

Akuntansi, Kekuasaan, dan Tata Kelola Harga Barang Dan Jasa Sektor Kehutanan: Perspektif Sosiologi Akuntansi Kawasan

Dita Aulia Buata¹, Niswatin², Tri Handayani Amaliah³

¹Universitas Negeri Gorontalo, e-mail: dbuata03@gmail.com

²Universitas Negeri Gorontalo, e-mail: niswatin@ung.ac.id

³Universitas Negeri Gorontalo, e-mail: triamaliah@ung.ac.id

Histori Naskah

ABSTRACT

Price governance in the forestry sector is often treated as a technical and administrative matter, relying on accounting calculations to determine the value of goods and services derived from forest resources. This approach tends to overlook the social context in which prices are constructed and the power relations embedded in accounting practices. This study aims to examine the role of accounting practices in shaping the governance of goods and services pricing in the forestry sector from a regional sociology of accounting perspective. This article is compiled using a qualitative literature review method to analyze and synthesize previous studies that discuss accounting, governance, power relations, and forestry management. The results show that accounting practices play a central role in framing forestry prices through cost measurement, economic valuation, and reporting mechanisms that are institutionally legitimized. Accounting not only supports price determination but also represents and reproduces power relations among actors, particularly the dominance of the state and formal institutions over local communities. In addition, accounting functions as a mechanism of legitimacy that normalizes forestry pricing policies as rational and objective, even though such policies may obscure social inequalities and ecological impacts. These findings indicate that forestry prices are not merely economic outcomes, but social constructions shaped by accounting practices and institutional power within a regional context.

Keywords : Sociology of accounting; Price governance; Forestry sector; Accounting and power; Literature review

ABSTRAK

Tata kelola harga barang dan jasa sektor kehutanan sering diperlakukan sebagai persoalan teknis dan administratif yang bertumpu pada perhitungan akuntansi untuk menentukan nilai ekonomi sumber daya hutan. Pendekatan tersebut cenderung mengabaikan konteks sosial dan relasi kekuasaan yang melekat dalam praktik akuntansi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran praktik akuntansi dalam membentuk tata kelola harga sektor kehutanan dengan menggunakan perspektif sosiologi akuntansi kawasan. Artikel ini disusun menggunakan metode literature review kualitatif untuk menganalisis dan mensintesis penelitian-penelitian terdahulu yang membahas akuntansi, tata kelola, relasi kekuasaan, dan sektor kehutanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akuntansi berperan sentral dalam membingkai penetapan harga kehutanan melalui mekanisme pengukuran biaya, penilaian nilai ekonomi, dan pelaporan yang dilegitimasi secara institusional. Praktik tersebut tidak hanya mendukung penentuan harga, tetapi juga merepresentasikan dan mereproduksi relasi kekuasaan antaraktor, khususnya dominasi negara dan institusi formal atas masyarakat kawasan. Selain itu, akuntansi berfungsi sebagai mekanisme legitimasi yang menormalisasi kebijakan harga kehutanan sebagai rasional dan objektif, meskipun berpotensi menutupi ketimpangan sosial dan dampak ekologis. Temuan ini menegaskan bahwa harga sektor kehutanan merupakan konstruksi sosial yang dibentuk oleh praktik akuntansi dan kekuasaan dalam konteks kawasan.

Kata Kunci : Sosiologi akuntansi; Tata kelola harga; Sektor kehutanan; Akuntansi dan kekuasaan; Literature review

Corresponding Author : Dita Aulia Buata, dbuata@gmail.com

PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Sektor kehutanan merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial masyarakat kawasan. Pengelolaan sektor ini tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam, tetapi juga menyangkut penetapan harga barang dan jasa kehutanan yang berdampak langsung pada distribusi manfaat ekonomi dan keberlanjutan kawasan. Secara normatif, tata kelola harga sektor kehutanan seharusnya dilandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, dengan akuntansi berperan sebagai instrumen rasional untuk mengukur dan merepresentasikan nilai ekonomi sumber daya hutan secara objektif (Lunawat & Lunawat, 2022; Maulia & Yanto, 2020).

Dalam praktiknya, akuntansi diharapkan mampu menginternalisasi biaya lingkungan dan sosial yang timbul dari aktivitas pengelolaan hutan, sehingga harga yang ditetapkan tidak hanya mencerminkan kepentingan ekonomi jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan kawasan. Sejumlah penelitian akuntansi lingkungan menunjukkan bahwa praktik akuntansi yang ideal dapat mendukung tata kelola berkelanjutan melalui pengungkapan informasi lingkungan dan sosial yang memadai (Anggreni et al., 2025; Rahmawati et al., 2024). Dengan demikian, akuntansi diposisikan sebagai alat penting dalam mendukung kebijakan harga kehutanan yang bertanggung jawab.

Namun demikian, berbagai temuan empiris menunjukkan bahwa praktik akuntansi dalam sektor kehutanan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi normatif tersebut. Rahayu et al. (2021) mengungkap bahwa perhitungan biaya dalam konteks kebakaran hutan dan lahan justru menunjukkan adanya inefisiensi struktural yang berpotensi mengaburkan dampak sosial dan lingkungan. Angka-angka akuntansi yang digunakan lebih berfungsi sebagai alat administratif untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan, dibandingkan sebagai representasi utuh dari biaya yang ditanggung oleh masyarakat dan ekosistem. Hal ini menunjukkan bahwa praktik akuntansi kehutanan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai proses teknis, melainkan sebagai bagian dari mekanisme tata kelola kawasan.

Dimensi sosial dan politik praktik akuntansi kehutanan semakin terlihat dalam kajian mengenai perhutanan sosial dan akuntabilitas publik. Ramadhan et al. (2025) menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas dalam kemitraan perhutanan sosial cenderung bersifat prosedural dan simbolik, sehingga lebih berfungsi sebagai alat legitimasi kebijakan daripada sarana pertanggungjawaban substantif kepada masyarakat kawasan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa akuntansi berperan dalam membentuk relasi kekuasaan antara negara, korporasi, dan masyarakat lokal melalui mekanisme pelaporan, pengendalian biaya, dan penetapan harga kehutanan.

Di sisi lain, perkembangan penelitian akuntansi lingkungan dan keberlanjutan banyak menempatkan akuntansi sebagai instrumen peningkatan kinerja dan nilai ekonomi organisasi. Studi mengenai green accounting, environmental management accounting, dan pengungkapan emisi karbon menekankan hubungan antara tata kelola perusahaan, kinerja lingkungan, dan nilai perusahaan (Darmawan & Firmansyah, 2025; Hikmah Putri et al., 2025). Meskipun memberikan kontribusi penting, pendekatan tersebut relatif kurang menggali bagaimana praktik akuntansi beroperasi dalam konteks kawasan sumber daya alam yang sarat konflik kepentingan sosial dan ekologis, seperti sektor kehutanan.

Penelitian lain menunjukkan bahwa praktik akuntansi juga sering digunakan sebagai sarana penguatan legitimasi institusional dan pencitraan keberlanjutan. Breliastiti et al. (2025)

dan Vivian Veronika et al. (2025) mengungkap bahwa penerapan praktik keberlanjutan dan tata kelola berbasis ESG kerap diarahkan untuk meningkatkan reputasi dan nilai organisasi, sementara aspek distribusi nilai dan keadilan sosial kurang mendapat perhatian. Dalam konteks kehutanan, kondisi ini berpotensi memperkuat ketimpangan karena harga dan nilai ekonomi sumber daya hutan lebih banyak ditentukan oleh aktor dominan dibandingkan oleh kepentingan masyarakat kawasan.

Kajian mengenai penganggaran dan pengendalian juga memperlihatkan bahwa praktik akuntansi tidak terlepas dari relasi kekuasaan. Abjan et al. (2024) menunjukkan bahwa penganggaran publik merupakan arena tarik-menarik kepentingan politik dan ekonomi, sementara Odang et al. (2025) menegaskan bahwa sistem pengendalian manajemen dapat berperan ganda sebagai sarana peningkatan kapabilitas lingkungan sekaligus mekanisme kontrol yang membatasi partisipasi. Temuan-temuan ini memperkuat pandangan bahwa akuntansi merupakan praktik sosial yang tidak hanya mencatat realitas, tetapi juga membentuk realitas melalui standar dan kebijakan yang dilegitimasi secara institusional.

Meskipun literatur akuntansi dan tata kelola telah berkembang, kajian yang secara khusus mengintegrasikan perspektif sosiologi akuntansi dengan isu tata kelola harga barang dan jasa sektor kehutanan masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian lebih menekankan aspek kinerja, kepatuhan, atau nilai ekonomi organisasi, sementara proses sosial di balik penetapan harga dan distribusi nilai kawasan belum banyak dieksplorasi (Maulidah & Agus Winarno, 2022; Solovida et al., 2025). Akibatnya, harga sektor kehutanan masih sering dipahami sebagai variabel teknis atau administratif, bukan sebagai konstruksi sosial.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tata kelola harga barang dan jasa sektor kehutanan dengan menempatkan akuntansi sebagai praktik sosial yang sarat relasi kekuasaan dalam konteks kawasan. Berbeda dari penelitian terdahulu yang berfokus pada aspek teknis dan kinerja, penelitian ini menekankan bagaimana praktik akuntansi berperan dalam membentuk, menormalisasi, dan melegitimasi kebijakan harga kehutanan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki signifikansi konseptual dalam memperluas pemahaman akuntansi sebagai instrumen tata kelola kawasan yang tidak netral, melainkan terikat pada dinamika sosial, politik, dan institusional (Putra & Digdowiseiso, 2024; Soetardjo & Nurmawati, 2024).

METODE PENELITIAN/RESEARCH METHOD

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mengkaji peran praktik akuntansi dalam membentuk tata kelola harga barang dan jasa sektor kehutanan dari perspektif sosiologi akuntansi kawasan. Penelitian kepustakaan dipilih karena fokus kajian diarahkan pada pemahaman konseptual dan sintesis kritis atas temuan-temuan penelitian terdahulu, bukan pada pengumpulan data lapangan secara langsung. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah konstruksi makna, relasi kekuasaan, serta mekanisme legitimasi yang melekat dalam praktik akuntansi kehutanan (Snyder, 2019).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan, meliputi artikel jurnal ilmiah, buku akademik, dan publikasi ilmiah lain yang relevan dengan topik akuntansi, tata kelola, kekuasaan, dan sektor kehutanan. Literatur yang dianalisis dipilih berdasarkan relevansi substansi dengan fokus penelitian dan digunakan sebagai dasar untuk membangun pemahaman teoritis serta kerangka analisis yang komprehensif.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif *interpretatif*, dengan menempatkan akuntansi sebagai praktik sosial yang tidak netral dan sarat dengan konteks institusional serta relasi kekuasaan. Pendekatan ini digunakan untuk menafsirkan bagaimana praktik akuntansi berperan dalam membentuk, mereproduksi, dan melegitimasi tata

kelola harga sektor kehutanan, sebagaimana direpresentasikan dalam literatur yang dianalisis (Maulidah & Agus Winarno, 2022).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan pengumpulan literatur yang relevan dengan *research question* penelitian, yaitu peran praktik akuntansi dalam tata kelola harga kehutanan, relasi kekuasaan antaraktor, serta fungsi legitimasi akuntansi dalam konteks kawasan. Literatur yang terkumpul selanjutnya diklasifikasikan dan dikelompokkan berdasarkan tema dan fokus kajian untuk memudahkan proses analisis.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-tematik, dengan mengidentifikasi pola, konsep utama, dan kecenderungan temuan dalam penelitian terdahulu. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan dan mensintesis argumen antar studi untuk menghasilkan pemahaman yang terintegrasi mengenai tata kelola harga sektor kehutanan. Proses sintesis ini digunakan untuk menjawab *research question* dan merumuskan kontribusi konseptual penelitian dalam kerangka sosiologi akuntansi kawasan (Snyder, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Discussion 1: Akuntansi, Kekuasaan, dan Tata Kelola Harga dalam Sektor Kehutanan

Akuntansi dalam konteks sektor kehutanan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai seperangkat teknik pengukuran dan pelaporan keuangan, melainkan sebagai praktik sosial yang beroperasi dalam kerangka institusional dan relasi kekuasaan tertentu. Dalam perspektif sosiologi akuntansi, akuntansi dipahami sebagai bahasa formal yang digunakan untuk mendefinisikan, membingkai, dan melegitimasi realitas ekonomi, termasuk dalam penetapan harga barang dan jasa kehutanan (Maulia & Yanto, 2020). Dengan demikian, harga kehutanan bukan sekadar hasil kalkulasi ekonomi, tetapi merupakan konstruksi sosial yang dibentuk melalui praktik akuntansi yang dilegitimasi secara formal.

Secara normatif, tata kelola harga sektor kehutanan seharusnya mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, dengan menginternalisasi biaya sosial dan lingkungan yang timbul dari aktivitas pengelolaan hutan. Akuntansi lingkungan dan akuntansi keberlanjutan sering diposisikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tersebut melalui pengungkapan informasi non-keuangan yang relevan (Lunawat & Lunawat, 2022; Rahmawati et al., 2024). Namun, temuan berbagai penelitian menunjukkan bahwa praktik akuntansi dalam sektor kehutanan masih didominasi oleh rasionalitas ekonomi-administratif, sehingga aspek sosial dan ekologis sering kali direduksi atau diperlakukan secara simbolik (Rahayu et al., 2021).

Dalam praktiknya, akuntansi berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang mengatur bagaimana biaya, nilai, dan harga kehutanan ditentukan serta dilaporkan. Standar, indikator kinerja, dan prosedur pelaporan yang digunakan mencerminkan kepentingan aktor dominan, khususnya negara dan institusi formal pengelola sumber daya alam. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi berperan dalam merepresentasikan dan mereproduksi relasi kekuasaan dalam tata kelola kawasan kehutanan, di mana masyarakat lokal cenderung memiliki ruang terbatas dalam mempengaruhi penetapan harga (Abjan et al., 2024; Ramadhan et al., 2025).

Selain sebagai instrumen pengendalian, akuntansi juga berfungsi sebagai mekanisme legitimasi kebijakan harga kehutanan. Penyajian angka, laporan keuangan, dan laporan lingkungan membingkai kebijakan harga sebagai rasional, objektif, dan berbasis data, sehingga mengurangi ruang kritik terhadap kebijakan tersebut. Praktik pelaporan keberlanjutan dan ESG sering kali menekankan kepatuhan dan pencapaian kinerja, sementara isu ketimpangan distribusi manfaat dan dampak sosial-ekologis kurang mendapat perhatian (Darmawan & Firmansyah, 2025; Hikmah Putri et al., 2025).

Dengan demikian, tata kelola harga barang dan jasa sektor kehutanan dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara praktik akuntansi, relasi kekuasaan, dan mekanisme legitimasi institusional. Akuntansi tidak hanya mencatat realitas ekonomi, tetapi juga membentuk realitas tersebut melalui standar dan kebijakan yang dilegitimasi secara formal. Perspektif sosiologi akuntansi kawasan menjadi relevan untuk mengungkap dimensi sosial dan politik di balik praktik akuntansi kehutanan, sekaligus memperluas pemahaman bahwa harga merupakan arena sosial yang diproduksi dan direproduksi melalui praktik akuntansi dalam konteks kawasan (Putra & Digdowiseiso, 2024; Soetardjo & Nurmawati, 2024).

B. Discussion 2: Realitas Praktik Akuntansi dan Permasalahan Tata Kelola Harga Sektor Kehutanan

Secara umum, praktik tata kelola harga barang dan jasa sektor kehutanan menunjukkan adanya ketimpangan antara tujuan normatif kebijakan dan realitas implementasinya. Harga kehutanan secara formal ditetapkan berdasarkan perhitungan biaya dan nilai ekonomi yang disusun melalui praktik akuntansi. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa proses tersebut sering kali bersifat administratif dan teknokratis, sehingga kurang merepresentasikan kondisi sosial dan ekologis yang dihadapi masyarakat kawasan hutan (Maulia & Yanto, 2020; Rahayu et al., 2021).

Dalam praktiknya, perhitungan biaya kehutanan lebih banyak menekankan aspek finansial yang mudah diukur, seperti biaya operasional dan penerimaan negara, sementara biaya lingkungan dan sosial cenderung disederhanakan atau diabaikan. Kondisi ini menyebabkan harga kehutanan tidak sepenuhnya mencerminkan beban ekologis dan sosial yang ditanggung oleh kawasan. Rahmawati et al. (2024) menunjukkan bahwa praktik akuntansi lingkungan masih berfokus pada kepatuhan pelaporan, bukan pada internalisasi dampak lingkungan dalam penetapan harga.

Permasalahan lain yang muncul adalah keterbatasan partisipasi masyarakat kawasan dalam proses penetapan harga kehutanan. Meskipun masyarakat lokal sering menjadi pihak yang paling terdampak oleh kebijakan harga, peran mereka dalam proses akuntansi dan pengambilan keputusan relatif minimal. Ramadhan et al. (2025) mengungkap bahwa praktik akuntabilitas dalam perhutanan sosial lebih bersifat prosedural, sehingga suara masyarakat kawasan kurang terakomodasi secara substantif dalam tata kelola harga.

Selain itu, praktik pelaporan keberlanjutan dan pengungkapan lingkungan sering kali digunakan sebagai sarana untuk memperkuat legitimasi kebijakan harga kehutanan. Laporan-laporan tersebut menampilkan citra kepatuhan dan tanggung jawab institusional, namun belum sepenuhnya merefleksikan ketimpangan distribusi manfaat ekonomi dan dampak sosial-ekologis di tingkat kawasan. Darmawan & Firmansyah (2025) serta Hikmah Putri et al. (2025) menunjukkan bahwa praktik keberlanjutan sering diarahkan pada pencitraan dan pemenuhan standar, bukan pada transformasi substantif tata kelola harga.

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa tata kelola harga sektor kehutanan masih menghadapi berbagai permasalahan struktural yang berkaitan dengan dominasi aktor tertentu, keterbatasan representasi nilai sosial dan lingkungan, serta fungsi legitimasi praktik akuntansi. Dalam konteks ini, akuntansi tidak hanya berperan sebagai alat teknis, tetapi juga sebagai mekanisme yang membentuk dan mempertahankan kebijakan harga kehutanan. Oleh karena itu, pemahaman atas realitas praktik akuntansi kehutanan perlu ditempatkan dalam kerangka sosiologi akuntansi kawasan agar mampu mengungkap dinamika sosial dan kekuasaan yang melatarbelakangi tata kelola harga sektor kehutanan (Putra & Digdowiseiso, 2024; Soetardjo & Nurmawati, 2024).

C. Discussion 3: Implikasi Praktik Akuntansi Terhadap Tata Kelola Harga dan Kehidupan Kawasan Kehutanan

Meskipun praktik akuntansi dalam tata kelola harga sektor kehutanan secara formal dirancang untuk menciptakan keteraturan dan kepastian kebijakan, berbagai temuan menunjukkan bahwa penerapannya tidak selalu berjalan selaras dengan kebutuhan sosial dan ekologis kawasan. Perbedaan antara tujuan normatif dan realitas implementasi terlihat dari dominasi pendekatan teknokratis dalam penetapan harga, yang cenderung mengedepankan efisiensi dan kepatuhan administratif. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketegangan antara kebijakan harga kehutanan dan realitas kehidupan masyarakat kawasan yang bergantung langsung pada sumber daya hutan (Rahayu et al., 2021; Rahmawati et al., 2024).

Dalam praktiknya, kebijakan harga kehutanan yang dilegitimasi melalui angka dan laporan akuntansi sering kali sulit diterapkan secara adaptif di tingkat lokal. Masyarakat kawasan dihadapkan pada kebijakan harga yang bersifat seragam, sementara kondisi sosial, budaya, dan ekologis antarwilayah sangat beragam. Ketidaksesuaian ini berpotensi menimbulkan resistensi sosial, melemahkan kepercayaan terhadap institusi pengelola, serta mengurangi efektivitas tata kelola harga kehutanan itu sendiri (Abjan et al., 2024; Ramadhan et al., 2025).

Selain itu, fungsi legitimasi akuntansi yang kuat dapat membatasi ruang dialog dan koreksi kebijakan. Ketika kebijakan harga telah dibingkai sebagai rasional dan objektif melalui praktik akuntansi, kritik terhadap kebijakan tersebut sering kali dipersepsikan sebagai tidak berbasis data atau tidak prosedural. Hal ini menyebabkan kebijakan harga kehutanan cenderung dipertahankan meskipun menimbulkan dampak sosial dan ekologis yang signifikan di tingkat kawasan (Darmawan & Firmansyah, 2025; Hikmah Putri et al., 2025).

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa tata kelola harga sektor kehutanan tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial dan relasi kekuasaan yang melingkupinya. Akuntansi berperan penting dalam membentuk, menormalisasi, dan mempertahankan kebijakan harga, sekaligus menentukan siapa yang memiliki otoritas dalam proses tersebut. Oleh karena itu, praktik akuntansi yang terlalu menekankan kepatuhan dan legitimasi berpotensi mengabaikan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan kawasan (Putra & Digdowiseiso, 2024; Soetardjo & Nurmawati, 2024).

Dengan demikian, diperlukan pendekatan tata kelola harga kehutanan yang lebih kontekstual dan reflektif, dengan memposisikan akuntansi sebagai praktik sosial yang terbuka terhadap kritik dan dialog. Integrasi perspektif sosiologi akuntansi kawasan memungkinkan praktik akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian dan legitimasi, tetapi juga sebagai sarana untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologis dalam pengelolaan sektor kehutanan. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat keharmonisan kebijakan harga dengan realitas kehidupan masyarakat kawasan serta mendukung keberlanjutan tata kelola kehutanan secara jangka panjang (Lunawat & Lunawat, 2022; Maulidah & Agus Winarno, 2022).

PENUTUP

Berdasarkan paparan hasil dan pembahasan yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa tata kelola harga barang dan jasa sektor kehutanan tidak dapat dipahami sebagai proses teknis yang netral, melainkan sebagai konstruksi sosial yang dibentuk melalui praktik akuntansi dalam konteks kawasan. Praktik akuntansi berperan aktif dalam membingkai pengukuran biaya, penilaian nilai ekonomi, dan pelaporan harga kehutanan, sehingga harga yang dihasilkan lebih mencerminkan rasionalitas institusional dibandingkan kompleksitas sosial dan ekologis kawasan. Dalam konteks ini, akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai alat

pencatat, tetapi juga sebagai mekanisme yang menentukan apa yang dianggap bernilai, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam kebijakan harga kehutanan.

Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik akuntansi kehutanan merepresentasikan dan mereproduksi relasi kekuasaan antaraktor kawasan, khususnya dominasi negara dan institusi formal dalam penetapan standar dan kebijakan harga. Melalui mekanisme pelaporan dan pengendalian, akuntansi juga berfungsi sebagai sarana legitimasi yang menormalisasi kebijakan harga kehutanan sebagai rasional dan objektif, meskipun kebijakan tersebut berpotensi menutupi ketimpangan distribusi manfaat serta dampak sosial dan ekologis. Dengan demikian, tata kelola harga sektor kehutanan merupakan hasil interaksi antara praktik akuntansi, struktur kekuasaan, dan mekanisme legitimasi institusional dalam konteks kawasan.

Adapun saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil penelitian ini adalah perlunya pengembangan praktik akuntansi kehutanan yang lebih kontekstual dan reflektif terhadap kondisi sosial serta ekologis kawasan. Pendekatan akuntansi yang tidak semata-mata berorientasi pada kepatuhan administratif dan efisiensi ekonomi perlu dikembangkan agar mampu membuka ruang partisipasi masyarakat kawasan dalam proses penetapan harga. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggabungkan pendekatan literature review dengan studi lapangan agar dapat menggali secara lebih mendalam dinamika praktik akuntansi, relasi kekuasaan, dan implikasinya terhadap kehidupan sosial masyarakat di kawasan kehutanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abjan, G., Djamhuri, A., & Roekhudin. (2024). Republicanism-Based Budgeting: Politik Kewargaan dan Resistensi Terhadap Neoliberalisme dan Oligarki. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 14(3), 710–735. <https://doi.org/10.22219/jrak.v14i3.36011>
- Anggreni, S. M., Sisdiyani, E. A., & Badera, I. D. N. (2025). Enhancing Firm Value through Green Accounting and Environmental Performance: The Mediating Effect of Profitability. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 17(1), 50–64. <https://doi.org/10.15294/jda.v17i1.10242>
- Breliastiti, R., Andry, J. F., Lee, F. S., & Nelson, C. I. (2025). Best Sustainability Practices With Sustainalytics: Insights From IDX ESG Star Companies. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 18(1), 22. <https://doi.org/10.30813/jab.v18i1.7544>
- Darmawan, L., & Firmansyah, A. (2025). Carbon Emission Disclosure, Carbon Performance, and Firm Value: Exploring Intellectual Capital's Role. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 17(1), 85–101. <https://doi.org/10.15294/jda.v17i1.19480>
- Hikmah Putri, N., Savitri, E., & Silfi, A. (2025). PENGUNGKAPAN EMISI KARBON: MEMAHAMI PERAN PROFITABILITAS, GENDER DEWAN, DAN MEDIA EXPOSURE. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 3(1), 438–457.
- Lunawat, A., & Lunawat, D. (2022). Do Environmental, Social, and Governance Performance Impact Firm Performance? Evidence from Indian Firms. *Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management*, 6(1). <https://doi.org/10.28992/ijSAM.v6i1.519>
- Maulia, D., & Yanto, H. (2020). The Determinants of Environmental Disclosure in Companies in Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 11(3), 682–691. [https://doi.org/10.14505/jemt.v11.3\(43\).22](https://doi.org/10.14505/jemt.v11.3(43).22)
- Maulidah, I., & Agus Winarno, W. (2022). Literature Review and Synthesis of Environmental Management Accounting (EMA): A Systematic Review Study. *Accounting and Information Technology*, 15(1), 34–61.
- Odang, N. K., Murni, I., Zharaura, K. A., & Setiaji, Y. T. (2025). When Control Backfires: The Double-Edged Role of Management Control Systems in Environmental Capabilities and Environmental Management Accounting Practices. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 12(1), 153–174. <https://doi.org/10.24815/jdab.v12i1.43670>
- Putra, S. S., & Digdowiseiso, K. (2024). The Impact of Social Media Marketing on Increasing Individual PPH and PNPB in Indonesia: A Systematic Literature Review. *Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(1), 29–39. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v7i1.747>
- Rahayu, S., Yudi., Rahayu., Lutfillah, N. Q., & Sari, D. P. (2021). COST [IN]EFFICIENCY DI BALIK KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(2), 351–369.
- Rahmawati, E., Nazaruddin, I., Widiastuti, H., Sofyani, H., & Kholid, A. W. N. (2024). Environmental accounting in public sector: systematic literature review. *Journal of Accounting and Investment*, 25(1), 75–90. <https://doi.org/10.18196/jai.v25i1.21344>
- Ramadhan, T., Sukoharsono, E. G., & Purwanti, L. (2025). Criticism of Accountability in Social Forestry Partnership from Habermas Perspective. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 19(2), 292–309. <https://doi.org/10.32815/jibeka.v19i2.2259>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104(July), 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Soetardjo, M. N., & Nurmawati, S. (2024). Pengaruh Tax Planning and Carbon Emission Disclosure Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Komisaris Independen Sebagai Pemoderasi. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 24(1), 131–150. <https://doi.org/10.25105/v24i1.19749>

- Solovida, G. T., Izzaty, K. N., & Nugraha, S. I. (2025). Environmental management accounting and green practices as drivers of SME performance: evidence from an emerging economy. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 9(1), 222–243. <https://doi.org/10.46367/jas.v9i1.2441>
- Vivian Veronika, P., Muhsin., & Rusmita, S. (2025). Green Accounting, CSR, and Independent Commissioners on Firm Value: Audit Quality As a Moderator. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS)*, 8(3), 1425–1443. <https://doi.org/10.36085/jamekis.v8i3.9031>